

BUMDES UPDATE #101 Januari 2021



Nomor 101/2021 (Januari 2021)

Bumdes Update merupakan ringkasan Tim Bumdes.id atas kegiatan, hasil pengamatan dan diskusi isu-isu terkini terkait dengan Bumdes. Bumdes Update juga memberikan informasi terkini mengenai program-program dan konsep Bumdes.id. Konsep Bumdes.id dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak yang tergabung dalam Sinergi ABCGFM (Academics, Business, Community, Government, Fascilitator & Media). Bumdes.id merupakan komunitas dan lembaga yang dikelola oleh Syncore Indonesia dan terbuka bekerjasama dengan berbagai pihak. Konsep-Konsep Bumdes.id telah dituangkan dan diterapkan dalam bentuk Pedoman, Buku, TOT, Artikel, Template dan Petunjuk Teknis.

Daftar Topik

- 1 Ringkasan Resolusi Bumdes
- 2 Refleksi Bumdes 2014-2021
- 3 Program Scale Up Bumdes Bumdes
- 4 Update Kegiatan Scale Up Bumdes 2021

1. RESOLUSI BUMDES 2021

Pada tanggal 15 Januari 2021, bertepatan dengan 7 (tujuh) tahun berlakunya UU Desa, kami dari Bumdes.id mengadakan acara Refleksi dan Konsolidasi Bumdes. Hasil dari acara tersebut adalah 5 butir Resolusi Bumdes 2021 sebagai berikut:

Butir Resolusi	Penjelasan	Tindak Lanjut	Pelaksanaan
1. Scale Up Bumdes	Mendukung Bumdes di 2021 dalam penguatan Bisnis. Program Scale Up Bumdes akan menysasar 1.000 Bumdes dengan menggalang kerjasama dengan Industri dan Kampus.	Seleksi 1.000 Bumdes dari 2.015 Bumdes yang daftar, Memperluas MOU dengan Mitra, TOT Tim Scale Up Bumdes	Jan-Des 2021
2. Klasterisasi Usaha Bumdes	Mengembangkan 6 Klaster Usaha Bumdes secara berkelanjutan yaitu Wisata, Pengelolaan Sampah, Air Bersih, Pengolahan Pangan, Perdagangan dan Jasa Keuangan.	Launching BumdesGO untuk memudahkan pengelolaan Komunitas Bumdes, Klasterisasi Usaha dan Mentoring.	Jan-Des 2021
3. Kolaborasi Bumdes Industri Kampus	Mengembangkan kolaborasi Bumdes-Industri-Kampus untuk memacu inovasi sekaligus mendukung program Kampus Merdeka untuk Desa	Target dari 30 Mitra Kampus ke 50 Mitra Kampus dan 10 Industri besar	Jan-Des 2021
4. Transformasi Digital	Mendukung Trasnformasi Digital untuk Desa dan Bumdes	Launching BumdesGO sebagai jembatan digital Bumdes dan kerjasama dengan apps yang lain.	Jan-Des 2021
5. Kosolidasi Bumdes dan Bumdes Bersama Nasional	Mendukung aspirasi Bumdes dan Bumdes Bersama untuk berhimpun dalam Bumdes Bersama Indonesia dengan anggota minimal 1.000 Bumdes	Launching program dengan marketplace dan Mou dengan pengembang lokal	Jan-Des 2021



www.bumdes.id



Fanspage :
Bumdes.id

Group :
BUMDES.ID



@bumdes.id



bumdesTV

2. Refleksi Bumdes 2014-2021

Paska 7 Tahun berlakunya UU Desa, Bumdes telah menunjukkan kinerja yang terus meningkat. Dari sisi jumlah, Bumdes meningkat pesat dari 1.222 di tahun 2014, menjadi 41.129 di tahun 2021. Berdasarkan pendataan Kemendes PDTT di tahun 2020 tercatat ada penyertaan modal ke Bumdes dari Dana Desa sebesar Rp4.1 Triliun dan Bumdes berhasil mencatatkan sumbangan ke Pendapatan Asli Desa sebesar Rp1.1 Triliun. Kami mencatat ada banyak hal positif yang telah dicapai, tetapi masih ada beberapa hal juga yang perlu langkah-langkah perbaikan. Ringkasan poin-poin penting dalam refleksi Bumdes 2014-2021 yang mendasari penyusunan Resolusi Bumdes 2021.

- Bumdes bukanlah hal yang baru. Bumdes sudah disebut dalam UU No 32/2004. Berdasarkan tata aturan tersebut pendirian, pengelolaan Bumdes perlu diatur dalam peraturan daerah. Pada tahun 2006 mulai bermunculan adanya Bumdes, sebagian besar karena adanya bantuan dana bergulir dari pemerintah daerah. Pengelolaan dana bergulir dari pemerintah daerah tersebut memerlukan sebuah bentuk kelembagaan di tingkat desa, sehingga dibentuklah Bumdes. Agar pengaturan Bumdes antar daerah tidak ada perbedaan yang mencolok, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri 39/2010.
- Seting Bumdes dalam Permendagri 39/2010, identik dengan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Konteks ini bisa dipahami karena dalam kerangka UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa termasuk dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah. Sehingga pengaturan berbagai hal di desa perlu dituangkan dalam bentuk Perda.
- Posisi ini menjadi berubah sejak berlakunya UU No 6/2014 atau yang lebih dikenal dengan UU Desa. Desa bukan lagi sebagai wilayah administratif, tetapi diakui dan dihormati sebagai sebuah kesatuan hukum dan bentuk pemerintahan terkecil, dengan hak-hak dan kewenangan lokal berskala desa.
- Pendirian dan pengelolaan Bumdes sendiri masuk dalam kewenangan lokal skala desa. Oleh karenanya pendirian Bumdes cukup melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Secara substansi Bumdes dianggap resmi berdiri sejak diundangkan dalam bentuk Perdes. Kekuasaan tertinggi di Bumdes ada pada Musyawarah Desa. Kepemilikan mayoritas wajib oleh Pemerintah Desa, dan pendirian cukup dengan Perdes. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes, sebagai dasar acuan tertinggi, juga cukup disahkan lewat Perdes. Merujuk pada pengaturan khusus ini, maka Bumdes merupakan bentuk usaha yang bersifat khusus, yang berbeda dengan Perseroan Terbatas maupun Koperasi. Posisi ini menjadi berubah sejak berlakunya UU No 6/2014 atau yang lebih dikenal dengan UU Desa. Desa bukan lagi sebagai wilayah administratif, tetapi diakui dan dihormati sebagai sebuah kesatuan hukum
- Awalnya tidak ada yang mengira Bumdes akan besar dan tumbuh di mana-mana. Pengambil kebijakan tidak mengantisipasi ada Bumdes yang omzetnya milyaran dan cakupan operasinya bisa antar kabupaten, bahkan sampai di level nasional. Hal ini menjadi problematika, ketika Bumdes beroperasi di level lokal skala desa, maka pengaturan lewat Perdes tentu cukup, namun bagaimana ketika Bumdes membesar dan perlu beroperasi lintas Kabupaten dan bahkan Nasional?
- Sejak Rembug Desa Nasional 2017 di Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, geliat Bumdes untuk membesar dan bersatu sudah sangat terasa. Aspirasi dari pengelola Bumdes dari seluruh Indonesia adalah perlunya ada pengakuan status hukum secara khusus untuk Bumdes. Hal ini dipandang penting untuk mendukung pengembangan bisnis Bumdes, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pengelola, supaya mereka tidak dikriminalisasi secara individu.
- Sebelum tahun 2017, Bumdes belum menjadi prioritas dari Kemendes PDTT. Hal ini bisa dirujuk pada RPJMN 2014-2019 yang hanya memasang target berdirinya 5.000 Bumdes di seluruh Indonesia. Bumdes menjadi prioritas utama penggunaan dana desa, sejak kepemimpinan Menteri Desa bapak Eko Putro Sandjojo. Pada tahun 2019, tercatat 50,199 Bumdes berdiri, hampir 10x lipat dari target awal Kemendes PDTT.

Refleksi Bumdes 2014-2021 (LANJUTAN)

- Meskipun dari sisi jumlah, perkembangan Bumdes sangat mengemberikan, namun dari sisi kesehatan usaha, Bumdes mendapat sorotan tajam.
- Berdasarkan profiling terhadap 50.199 Bumdes yang telah berdiri, 37,861 diantaranya aktif dan telah dilakukan profiling untuk 18.195 Bumdes, dengan kategori 4.651 Bumdes Maju, 9.682 Berkembang dan 3.861 Pemula.
- Berdasarkan profiling terhadap 50.199 Bumdes yang telah berdiri, 37,861 diantaranya aktif dan telah dilakukan profiling untuk 18.195 Bumdes, dengan kategori 4.651 Bumdes Maju, 9.682 Berkembang dan 3.861 Pemula.
- Kondisi ini menarik perhatian dari Presiden Jokowi. Pada Rapat Terbatas Kabinet di Istana Bogor 11 Desember 2019, Presiden Jokowi mendapatkan laporan dari uji petik 8,000 Bumdes, terdapat 2.000 Bumdes yang mangkrak dan ribuan Bumdes lainnya belum memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat desa. President Jokowi memberikan arahan Bumdes perlu di scalling up dan di integrasikan dengan rantai pasok nasional.
- Arahan Presiden Jokowi disambut cepat oleh Kemendes PD TT, dengan upaya program Revitalisasi Bumdes. Pada RPJMN Kemendes PD TT telah dicanangkan target untuk menjadikan 1.600 Bumdes Maju dan 10.000 Bumdes berkembang selama 5 tahun.
- Kemudian Pandemi COVID-19 datang. Berbagai program perlu disesuaikan. Namun kita mencatat bahwa desa-desa ternyata lebih tanggap dan tangguh di masa pandemi. Pada masa Pandemi COVID19, Desa juga menunjukkan lebih tanggap dan tangguh. Jumlah pasien positif COVID19 yang berdomisili di Desa hanya berkisar 2% dari total pasien COVID19.
- Salah satu kunci keberhasilan Desa dalam menekan persebaran COVID19 adalah adanya Pos Relawan Desa Lawan COVID-19 di 56.436 desa yang merekrut relawan desa sebanyak 1.880.174 orang. Relawan kemudian mendata pemudik ke desa sebanyak 1,044.558 orang dan warga rentan sakit sebanyak 119.860 orang. Relawan juga mendirikan tempat isolasi di 21.292 desa yang telah digunakan oleh ODP sebanyak 191.610 orang.
- Beberapa data juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID19 di desa lebih rendah daripada di kota. Kehidupan di desa praktis tidak banyak berubah. Orang masih bisa tetap kerja di sawah, pergi ke pasar, dan bersosialisasi, meskipun tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- Pada sisi lain, meskipun berbagai industri dan penjualan produk menunjukkan trend penurunan, namun penjualan produk pangan dan herbal justru menunjukkan peningkatan. Dari total 74.453 desa di Indonesia, Kemendes PD TT mencatat ada 20.034 Desa memiliki potensi perkebunan, 12.827 Desa memiliki potensi perikanan, 64.587 desa memiliki potensi energi baru terbarukan, 61.821 Desa memiliki potensi pertanian, dan 82.77% penduduk adalah petani.
- Momentum ini harus dimanfaatkan oleh Desa. Sesuai Arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Percepatan Pemulihan Ekonomi Desa, 24 September 2020, bahwa pandemi ini harus jadi momentum untuk menginstal ulang, melakukan reformasi dan transformasi ekonomi desa. Secara umum ada tiga arahan Presiden pertama untuk sinkronisasi program, peningkatan partisipasi dan kreasi masyarakat dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa dan peningkatan daya ungkit dengan masuk ke *supply chain* yang lebih luas sehingga bisa *upskilling* dan naik kelas.
- Posisi Bumdes menjadi semakin kuat, karena pada pasal 117 UU Cipta Kerja, disebut bahwa Bumdes adalah sebuah Badan Hukum. Pengakuan status hukum Bumdes ini akan membuka banyak peluang bagi Bumdes untuk bekerjasama dengan lembaga keuangan, industri, perguruan tinggi dan lembaga yang lain.



Kembali Pada Jatidiri

Situasi sulit yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19, mendorong lahirnya kesadaran-kesadaran baru secara kolektif. Kita menyadari bahwa sistem dan pola-pola yang kita gunakan selama ini ternyata sangat rentan. Adanya satu guncangan oleh makhluk kecil yang nyaris tidak terlihat, sistem dan mesin perekonomian dunia seolah-olah menjadi berhenti bergerak. Kita kemudian jadi sadar, desa-desa yang selama ini kita pandang sebelah mata, ternyata lebih kebal terhadap guncangan, dan bukan hanya mereka dapat bertahan, tetapi juga menjadi tumpuan harapan kita di masa depan. Masa depan Indonesia ada di desa. Untuk itu, tepat kiranya kita gunakan momentum saat ini untuk kembali lagi pada jatidiri dan cita-cita bangsa kita.

- Pada Kitab Negarakertagama yang menggambarkan jaman keemasan Majapahit, ditulis di tahun 1369 oleh Mpu Prapanca, pada pupuh 89 ada bait “Negara dan Desa adalah layaknya Singa dan Hutan. Singa tidak dapat hidup tanpa hutan, dan tanpa singa hutan hanya akan dijajah para pendatang. Negara dan Desa, sebagaimana Singa dan Hutan, hidupnya tidak bisa dipisahkan. Negara akan kuat, jika desa-desa kuat”.
- Merujuk pada kejayaan Majapahit, bahwa tegaknya Negara adalah dari adanya desa-desa. Desa yang membentuk negara. Apabila desa-desa kuat maka negara akan kuat. Indonesia lahir dari desa. Indonesia yang besar ini adalah bagian dari desa-desa yang kecil. Bukan sebaliknya.
- Kembali pada Cita-Cita Indonesia Merdeka, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Lahirnya Indonesia adalah untuk mewujudkan Bangsa yang Adil dan Makmur. Tujuan itu dicapai dengan “Memajukan Kesejahteraan Umum” dan “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” . Memajukan kesejahteraan umum artinya kesejahteraan yang dirasakan oleh banyak pihak, bukan segelintir golongan.
- Kemudian merujuk pada semangat pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian Indonesia selayaknya dijalankan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Bumi, Air dan Kekayaan alam didalamnya harus dikuasai oleh Negara (dalam bentuk paling kecil hadirnya negara adalah melalui desa), untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan sistem yang paling cocok untuk itu adalah sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berjalan dari masyarakat, oleh, masyarakat dan untuk masyarakat.
- Bumdes sesuai pengertiannya pada pasal 1 UU Desa, adalah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan mengelola aset desa dan menyelenggarakan layanan, dan dimiliki sebagian besar oleh Pemerintah Desa dan sisanya oleh masyarakat desa. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Bumdes adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam ruang lingkup terkecil, yaitu wilayah desa dengan semangat pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki cita-cita yang besar dan percaya pada upayanya sendiri Untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Indonesia sudah waktunya kembali lagi ke jatidiri, sehingga memang sudah selayaknya Indonesia membangun kejayaan dan kemakmuran dari desa.



Relevansi Peta Jalan Bumdes 2018

Pada tahun 2018, sesaat sebelum dilaksanakan Musyarah Nasional Forum Bumdes Indonesia di Padang, Bumdes.id menerbitkan buku Peta Jalan Bumdes Sukses. Buku tersebut merupakan hasil refleksi dari pembahasan Rembug Desa Nasional 2017 di Panggunharjo, dan dinamika lapangan Bumdes yang terus bergeliat dan bergerak dengan cepat. Setelah lewat tiga tahun, kita perlu melihat kembali peta jalan tersebut dan melakukan modifikasi-modifikasi yang diperlukan.

- **Penguatan Kelembagaan** menjadi hal pertama dan utama di Bumdes, karena Bumdes tidak hanya masalah bisnis, tetapi ada masalah sosial dan politik lokal. Apabila Bumdes gagal mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Desa, BPD dan Kelompok Masyarakat, maka Bumdes dipastikan berumur pendek. Penguatan Kelembagaan artinya Bumdes memiliki status hukum yang pasti, diakui oleh lembaga/kementerian/organisasi yang lain, diterima dan didukung oleh masyarakat dan diakui perannya oleh Pemerintah Desa.
- **Peningkatan Kapasitas SDM** adalah kunci utama untuk penguatan Bumdes. Bumdes yang berkelanjutan memerlukan tata kelola, kepemimpinan dan manajerial yang kuat. Kepemimpinan Bumdes bersifat kolektif, dijalankan oleh Penasehat (Kepala Desa), Pengawas (Tokoh Masyarakat) dan Pelaksana Operasional (Direktur Bumdes dan jajarannya). Kompetensi utama yang dibutuhkan adalah Kepemimpinan Transformatif, Kewirausahaan Sosial dan Kapasitas Managerial. Pelatihan, Pendampingan dan Kemitraan strategis diperlukan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM. Perlu kolaborasi ABCGFM (Academics-Business-Community-Government-Facilitator-Media) untuk peningkatan kapasitas SDM Bumdes berkelanjutan.
- **Perluasan Akses Pasar, Modal, Teknologi dan Kemitraan** setelah kelembagaan kuat dan kapasitas SDM meningkat, fokus Bumdes harus bisnis, bisnis dan bisnis. Penguatan Bisnis ini dilakukan dengan dua strategi utama yaitu (1) peningkatan nilai tambah produk, (2) membangun jalur-jalur distribusi baru. Perlu kemitraan yang kuat, agar Bumdes bisa ada perluasan pasar, modal dan teknologi.
- **Pengembangan Jejaring Bumdes Nasional** Bumdes harus bermimpi besar dan berhimpun. Tanpa bisnis yang besar, maka kontribusi nyata Bumdes untuk masyarakat tidak akan bisa dirasakan. Lewat jejaring Bumdes Nasional, maka Bumdes akan bisa melakukan langkah-langkah raksasa membangun jaringan hulu hilir ekonomi lokal. Ada 4 hal yang perlu disiapkan (1) bagaimana menjadi desa basis produksi sekaligus konsumen, (2) menghubungkan antar desa dengan teknologi informasi/konektivitas, (3) membangun jalur-jalur logistik nasional, regional dan lokal, (4) menerapkan teknologi pengelolaan keuangan (fintech). Empat hal tersebut akan menjadikan Jejaring Bumdes sebagai sebuah pasar tunggal (close loop economy), sehingga perdagangan antar desa akan berkembang dan menjadi efisien. Bela beli produk desa tidak hanya jadi gerakan lokal, tetapi nasional.
- **Pilar Ekonomi Nasional** Bumdes pada akhirnya akan melahirkan ekonomi baru di Indonesia. Jika selama ini bicara pilar ekonomi terdiri dari Swasta, BUMN, Koperasi dan UMKM, maka akan ada tambah satu pilar lagi yaitu Bumdes. BUMN, Koperasi, UMKM dan Bumdes pada ujungnya akan jadi satu ekosistem yang saling terhubung, digerakkan oleh ekonomi berbagi dan dilengkapi dengan teknologi, sehingga bisa duduk sejajar, berdiri sama tinggi dengan pemain-pemain besar lainnya. Bumdes pada masanya akan dilihat bukan sebagai obyek pemberdayaan, tetapi subyek utama ekonomi pada tingkat lokal.

Arah Kedepan

- Pada masa pandemi ini, Peta Jalan Bumdes masih relevan untuk digunakan. Resolusi Bumdes 2021, dibangun berdasarkan refleksi kondisi terkini dalam 5 Tahapan Peta Jalan, sehingga kemudian melahirkan 5 Butir Resolusi Bumdes 2021.
- **Scale Up Bumdes** sudah saatnya Bumdes bicara bisnis yang besar, skala nasional dan melibatkan lebih banyak



pihak. Sudah waktunya pengembangan Bumdes dilakukan secara sistemik, bukan kasuistik. Saatnya pengembangan Bumdes dilakukan dengan pendekatan saintifik berbasis data, bukan asumsi kira-kira. Konsep yang terencana, terukur dan terkendali, akan memastikan pengembangan usaha Bumdes tepat sasaran dan berkelanjutan. Pada tahun 2021 ini kita akan mencanangkan Scale Up 1000 Bumdes lewat Skema Kolaborasi Bumdes Industri Kampus. Bukan hanya sekedar pelatihan dan pendampingan, tetapi ada penerapan inovasi dan ujungnya adalah kemitraan strategis dengan BUMN, Swasta Nasional, Kementerian/Lembaga, Organisasi Sosial/NGO.

- **Klasterisasi Usaha Bumdes**, upaya pengembangan Bisnis bukan lagi basis wilayah, basis kedaerahan, tetapi basis Klaster Usaha. Bumdes adalah wadah, pelaku usahanya adalah Unit-Unit Usaha Bumdes. Unit-Unit Usaha Bumdes tersebut bisa dijalankan sendiri, kolaborasi dengan kelompok masyarakat (Pokdarwis/Gapoktan) atau pihak ketiga. Sasaran Scale Up Bumdes adalah di tingkat Unit Usaha Bumdes. Pada masa Pandemi, dan masa sebelumnya terbukti hanya 6 Klaster Unit Usaha Bumdes yang bisa berkembang yaitu (1) Wisata, (2) Pengelolaan Sampah, (3) Pengelolaan Air Bersih, (4) Perdagangan, (5) Pengolahan Pangan dan (6) Jasa Keuangan. Perlu adanya Mentor dari praktisi, Konsultan dari Lembaga atau Perguruan Tinggi, Mahasiswa untuk terjun dilapangan, Kurator dari Industri dan pihak Kementerian/Pemprov/Pemkab sebagai pemangku kebijakan.
- **Kolaborasi Bumdes**, tanpa kolaborasi Bumdes tidak akan besar dan lambat berkembang. Skema Kolaborasi Bumdes Industri Kampus, dipandang cukup ideal dan tidak saling tumpang tindih peran. Inisiatif ini semakin mudah dilakukan karena ada kebijakan Kampus Merdeka dan Kedaireka dari Kemedikbud Dikti. Sudah saatnya Kampus benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ribuan Bumdes di tanah air.
- **Transformasi Digital**, teknologi digital saat ini bukan pilihan, tetapi satu-satunya cara bisnis untuk bertahan dan berkembang. Tanpa teknologi digital maka pelan-pelan kita akan ditinggalkan customer. Untuk itu bagaimana mendorong dan mempercepat transformasi digital di Bumdes adalah pertarungan bertahan atau punah bagi Bumdes di masa mendatang.
- **Konsolidasi Bumdes**, sudah menjadi hakikat badan usaha untuk tetap bertahan dan terus berkembang. Secara natural badan usaha-badan usaha yang memiliki nilai dan tujuan yang sama akan saling bekerjasama. Pada tahapan selanjutnya mereka akan bergabung atau berhimpun. Arah Bumdes-Bumdes untuk berhimpun sudah bisa kita lihat sejak Rembug Desa Nasional 2017, Musyawarah Nasional Forum Bumdes Indonesia 2018, Village Investment Forum 2019, dan harapannya di tahun 2021 ini akan semakin menjadi kenyataan.

3. Program Scale Up Bumdes

Peran Bumdes di masa pandemi patut kita beri apresiasi. Pada situasi ditengah Pandemi COVID19, hampir semua sektor di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif, kecuali sektor pertanian. Sektor pertanian di Kuartal 3, masih bisa tumbuh 2.4%. Sesuai Arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Percepatan Pemulihan Ekonomi Desa, 24 September 2020, bahwa pandemi ini harus jadi momentum untuk menginstal ulang, melakukan reformasi dan transformasi ekonomi desa. Secara umum ada tiga arahan Presiden pertama untuk sinkronisasi program, peningkatan partisipasi dan kreasi masyarakat dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa dan peningkatan daya ungkit dengan masuk ke supply chain yang lebih luas sehingga bisa upskilling dan naik kelas.

- Kemendes PDTT juga telah mengeluarkan Permendes No 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa berbasis SDGs Desa. Tiga prioritas pemanfaatan Dana Desa untuk tahun 2021 adalah : (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, utamanya untuk pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Bumdes, listrik desa dan usaha ekonomi produktif (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Dana Artinya, meskipun ada peluang yang nyata

Setelah ada ketegasan pengakuan Badan Hukum Bumdes lewat Pasal 117 di UU Cipta Kerja, maka tantangan terbesar Bumdes dan Bumdes Bersama selanjutnya adalah pada Pengembangan Usaha dan Penguatan Manajemen. Produk-produk yang dihasilkan Desa dan Bumdes, secara umum kualitas masih rendah, skala kecil dan harga kurang dapat bersaing. Perlu ada upaya untuk peningkatan nilai tambah



BUMDES UPDATE #101

Januari 2021



Nomor 101/2021 (Januari 2021)

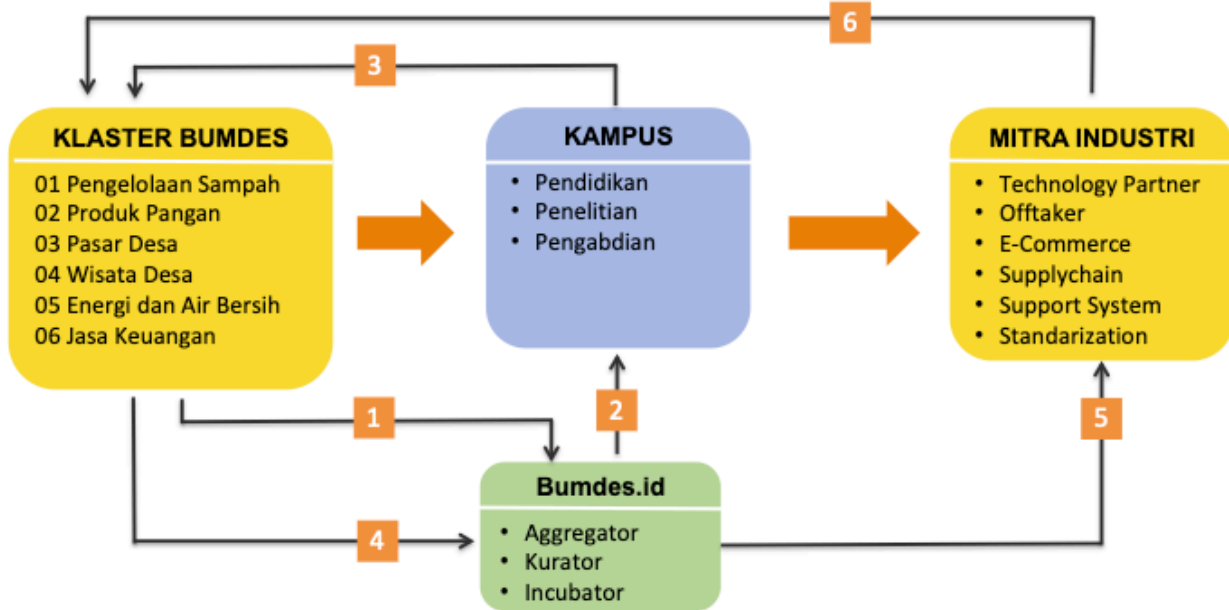
- produk sekaligus membangun jalur-jalur distribusi baru. Untuk itu Bumdes dan Bumdes Bersama perlu dipetakan, diklasifikasi, dilatih, didampingi dan dipertemukan dengan mitra-mitra pemerintah dan swasta dan desa inklusif.
- Tim Bumdes.id memfokuskan diri untuk menjalankan fungsi agregasi, kurasi dan inkubasi untuk Bumdes-Bumdes di seluruh Indonesia, sehingga tiada lagi Bumdes yang mangkrak. Pada masa pandemi, fungsi-fungsi tersebut kami jalankan secara digital. Salah satu kunci sukses dalam pelatihan – pendampingan – inkubasi adalah pemahaman mendalam atas kebutuhan masing-masing Bumdes dan luasnya ekosistem bisnis Bumdes yang dikembangkan oleh Bumdes.id. Namun pekerjaan ini tentu tidak bisa diselesaikan sendirian. Untuk itu kami mengundang Kampus-Kampus, dalam hal ini Dosen dan Mahasiswa untuk aktif terlibat.
- Kriteria untuk Bumdes-Bumdes yang disasar adalah:
 1. Berdiri lebih dari 2 tahun
 2. Memiliki Unit Usaha yang sudah mencatatkan keuntungan
 3. Tidak ada kendala sinyal internet
 4. Siap mengikuti semua tahapan program dengan serius
 5. Siap bermitra dengan perguruan tinggi dan BUMN
- Bumdes sepatutnya hadir untuk memberikan solusi pada masalah-masalah yang masih menghimpit warga desa. Bumdes bisa jadi wadah untuk bertemunya Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Bumdes selayaknya tidak jadi pemain, tetapi penghubung. Apabila Bumdes memposisikan menjadi pemain, maka Bumdes akan bersaing dengan UMKM dan Koperasi yang sudah berjalan di desa. Salah satu masalah mendasar warga desa adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan masyarakat desa secara umum masih rendah karena baru bisa menghasilkan komoditas dengan nilai tambah dan daya saing rendah. Berkaca dari situasi tersebut, Peran Bumdes perlu difokuskan pada dua hal: (1) Meningkatkan nilai tambah produk (2) Membangun jalur distribusi baru.
- Upaya Bumdes untuk meningkatkan nilai tambah produk dan membangun jalur distribusi baru memerlukan mitra. Perlu pengetahuan, pengalaman dan penguasaan teknologi untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk. Sayangnya, ketiga hal tersebut adalah kelemahan utama SDM di Desa. Setelah produk bernilai tambah, butuh akses dan jaringan pasar. Desa juga lemah dalam hal ini. Model kerjasama tripartit Bumdes – Industri – Kampus diharapkan dapat mengatasi dua masalah tersebut. Kampus mampu membantu pengkajian potensi dan merumuskan desain inovasi, sedang Industri mampu membantu secara teknologi dan akses pasar.
- Model kerjasama tripartit Bumdes-Industri-Kampus bukanlah hal yang baru. Model ini sudah dijalankan oleh beberapa kampus dan industri, meskipun belum masih. Menurut pengalaman kami di lapangan masih sering terjadi mismatch. Tidak semua kampus dan industri memiliki pemahaman yang mendalam tentang filosofi dan karakteristik unik Bumdes. Kampus dan industri juga tidak memiliki data yang lengkap desa-desa mana yang potensial diajak kerjasama. Pada sisi lain Bumdes juga perlu diyakinkan bahwa kerjasama ini aman dan akan menguntungkan bagi mereka. Untuk itu Bumdes.id sebagai komunitas digital Bumdes terbesar di Indonesia, yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan layanan bagi Bumdes, tergerak untuk ikut berkontribusi. Bumdes.id dapat berperan sebagai pihak yang independen untuk menilai kelayakan baik Bumdes, Industri, maupun Kampus yang akan terlibat kerjasama. Hadirnya Bumdes.id dalam skema kerjasama Bumdes-Industri-Kampus, sebagai pihak yang dipercaya dan dapat diterima ketiga pihak, diharapkan akan mempercepat proses dan meluaskan kerjasama.
- Peran Pemerintah Daerah juga sangat vital dalam kesuksesan program lewat :
 1. Penyediaan data-data untuk Bumdes yang akan disasar
 2. Sinkronisasi dan Matching program Scale Up dengan program yang telah direncanakan oleh Pemprov/Pemda, agar tidak tumpang tindih dan menambah nilai manfaat yang didapat Bumdes, karena didukung pendanaan dan program dari multipihak.
 3. Memobilisasi dan memotivasi Bumdes-Bumdes agar dapat mengikuti program dengan serius.
 4. Memperluas cakupan program dengan sinkronisasi dengan program-program dari OPD yang lain.



BUMDES UPDATE #101 Januari 2021



Nomor 101/2021 (Januari 2021)



4. Update Program Scale Up Bumdes 2021

Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1. Pendaftaran dan Seleksi 1000 Bumdes yang akan ikut program	5 sd 15 Januari 2021	Sudah mendaftarkan 2.015 Bumdes dari seluruh Indonesia
2. Dialog Bumdes dan Penjelasan Program	15 Januari 2021 pukul 13.30 via Zoom	Bertepatan dengan 7 Tahun UU Desa dan Diskusi Resolusi Bumdes 2021
3. Kick Off Scale Up Bumdes dan Kolaborasi Bumdes Industri Kampus	21 Januari 2021 pukul 13.30 via Zoom bersama Dirjend Dikti dan Sekjend Kemendes PDPT	<ol style="list-style-type: none"> Pengumuman Seleksi Lanjutan Scale Up Bumdes Launching BumdesGO Pengumuman TOT Tim Scale Up Bumdes
4. Pelaksanaan Seleksi Lanjutan	21 Januari 2021 – 12 Februari 2021	Pelaksanaan Seleksi Lanjutan
5. Pelaksanaan TOT Tim Scale Up Bumdes	10 sd 11 Februari 2021 (Batch 1)	TOT dua hari untuk Tim Scale Up Bumdes
6. Penyusunan Proposal dan Upload Proposal	Februari 2021	Paska TOT Tim Scale Up wajib menyusun proposal dan upload di platform yang sudah disediakan.
7. Pelaksanaan Program Scale Up Batch 1	Maret sd Juni 2021	Alokasi Tim dan Penerjunan Bumdes, Pelaksanaan Pemetaan, Pendampingan Penerapan Inovasi, Matching Program dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

